



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

KELAUTAN DAN PERIKANAN
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN

2024-2026

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan dan karunia-Nya maka **“Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026”** yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diselesaikan dengan baik sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Rencana Strategis ini disusun sebagai operasionalisasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2024 - 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT 2024 - 2026, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RZWP3K Provinsi NTT dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien antara perencanaan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah, maka dukungan pendanaan dari pemerintah pusat akan dapat direalisasikan untuk membantu menyelesaikan isu strategis di tingkat pemerintah daerah.

Ditengah derasnya arus industri digitalisasi yang merambah semua sektor kehidupan global, pemerintah telah mencanangkan Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan semua pelayanan kepada masyarakat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah dan mudah. Renstra ini juga telah merespon kebutuhan tersebut, yang

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan yang berkualitas di sektor kelautan dan perikanan dalam periode tahun 2024 - 2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 yaitu mewujudkan “**Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**”

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik melalui usaha pemikiran dan masukan sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 ini dapat tersusun dengan baik, Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Agustus 2024
Plt KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. AGUSTINUS BULU
PEMBINA TK I
NIP. 196809151995031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	37
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota	40
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	50
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	59
LAMPIRAN	

BAB I

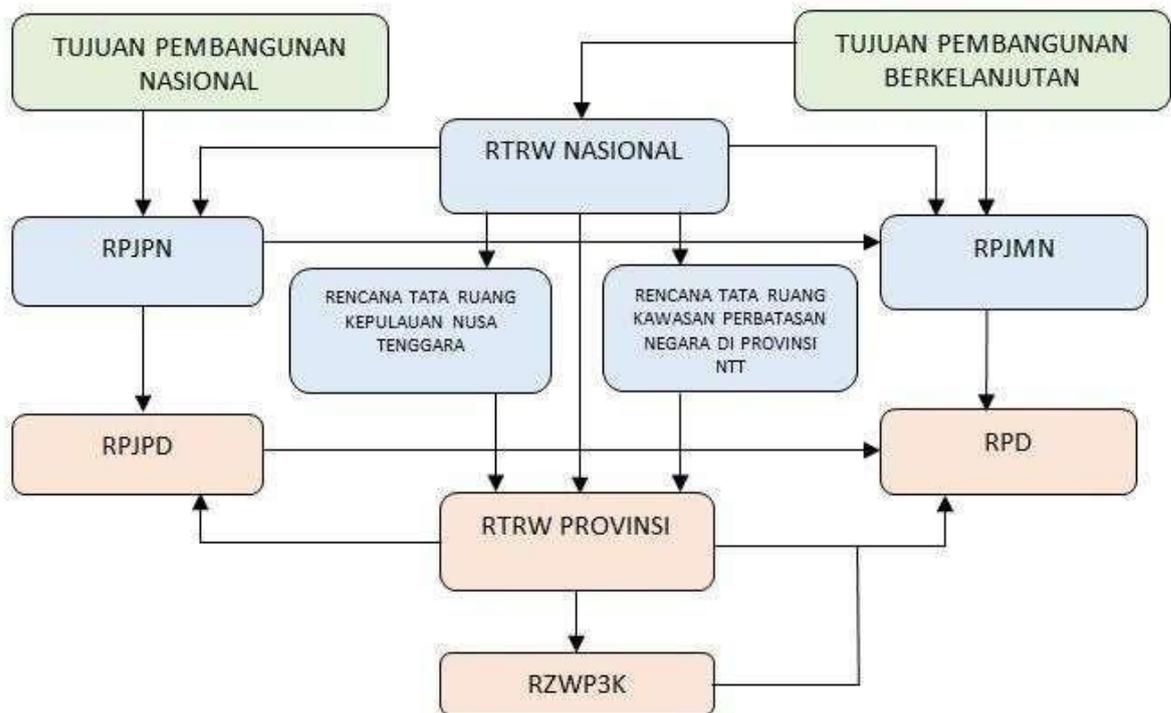
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai ± 5.700 km dan luas laut ± 200.000 km² serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ancaman Inflasi serta resesi global tentunya berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu dipertimbangkan dalam penyesuaian target-target pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Keterkaitan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) - sebagaimana Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RPD dengan Dokumen RTRW dan RZWP3K

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 - 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 - 2025, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah visi **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang penyusunan Renstra;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023;

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2024-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 - 2026.

1.3.2 Tujuan

- a. Merumuskan strategi dan arah pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2024 -2026 sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam RPJPD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2005 - 2025;
- b. Merumuskan program dan kegiatan strategis pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tahun 2024-2026 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya.
- c. Sebagai pedoman dalam mewujudkan kondisi pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan hingga tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8 Bab sebagaimana dibawah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra yang secara ringkas mengemukakan pengertian, fungsi, proses penyusunan, dan keterkaitan antara Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT. Pada sub bab landasan hukum memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pada sub bab maksud dan tujuan Renstra memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra dan susunan garis besar isi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dimana berisi penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta kedudukan dan tata laksana masing-masing eselon II, eselon III dan eselon IV. Pada sub bab sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia dan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab kinerja pelayanan memuat tentang tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 berdasarkan target Renstra periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan maupun indikator kinerja kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab terakhir memuat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini memuat identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Dalam sub bab ini dikemukakan permasalahan

pokok dan akar masalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Selanjutnya terdapat beberapa inovasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Pada sub bab Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memuat tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang terkait dengan visi, misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Sub bab selanjutnya berisi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT termasuk ke dalam 2 (dua) pilar dengan 4 (empat) *goals*/tujuan. Pada sub bab terakhir memuat Penentuan Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilanjutkan analisisnya menggunakan metode USG dan analisis SWOT.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT beserta indikator kinerja dan target kinerja tiga tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tiga tahun mendatang serta hubungan kinerja pembangunan daerah antara tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu tiga tahun mendatang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - 2026. Arah kebijakan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 – 2026 yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang merupakan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki uraian tugas dalam organisasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah.

2. Sekretaris

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, Pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan dinas, Cabang Dinas dan UPTD.

- Sub Bagian Keuangan

Memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan

pelaporan dinas.

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya meliputi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan pengelolaan ruang laut dan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap.

5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan meliputi pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi.

7. Cabang Dinas Wilayah I, II, III, IV dan V

Memimpin dan mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya meliputi pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan.

- Sub Bagian Tata Usaha

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, ketatausahaan, program data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan cabang dinas di wilayah kerjanya;

- Seksi Pengelolaan Kelautan

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan kelautan meliputi pengelolaan ruang laut serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya.

- Seksi Pengelolaan Perikanan

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan, perikanan budidaya, pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu pemasaran serta investasi di wilayah kerjanya.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 5 (lima) Cabang Dinas yaitu :

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, kelas A meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua;

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, , dan Kabupaten Sikka, di Larantuka;
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo, di Ende;
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V yang terdiri dari wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu.

8. UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang meliputi ketatausahaan, pendayagunaan, pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Sub Bagian Tata Usaha
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang meliputi ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan UPTD;
- Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Memimpin dan menyelenggarakan tugas seksi pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 12 mil;
- Seksi Pemantauan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Memimpin dan menyelenggarakan tugas seksi pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 12 mil;

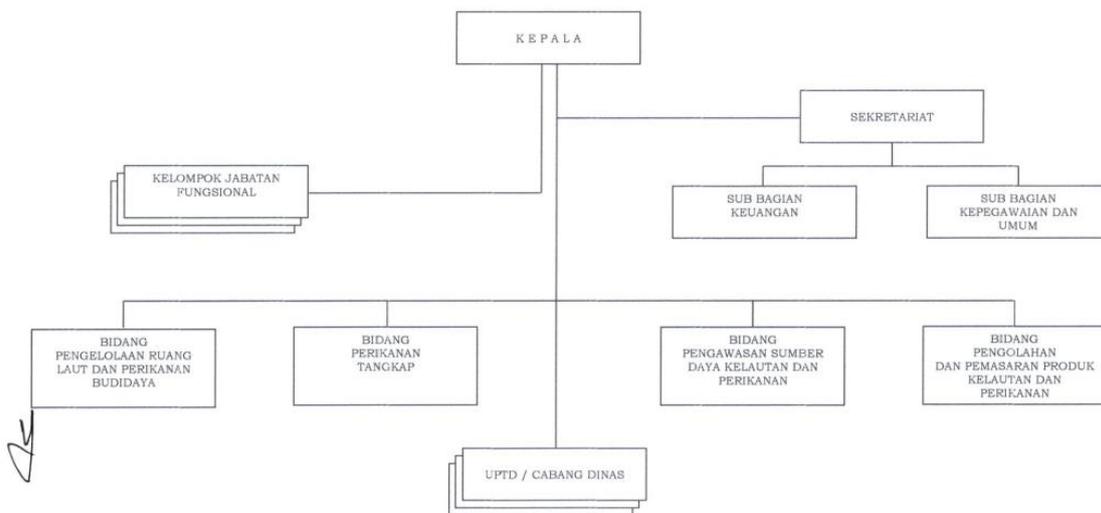
- Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 1 (satu) UPTD yaitu :

- UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, di Kalabahi.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 133 orang. Dilihat dari jenis kelamin maka jumlah pegawai laki-laki sebanyak 88 orang dan perempuan 45 orang, sedangkan menurut pangkat dan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III 95 orang dan golongan II 23 orang.

Dari tingkat pendidikan (per 19 Agustus 2024) dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Pendidikan Per jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	S3 (Doktor)	-	1	1
2.	S2 (Pasca Sarjana)	7	5	12
3.	S1 (Sarjana/Diploma-IV)	52	32	84
4.	Sarmud/Diploma III	3	1	4
5.	SLTA/Sederajad	20	6	26
6.	SMP/Sederajad	4	-	4
7.	SD/SR	2	-	2
T O T A L		88	45	133

2.2.2 Sumber Daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok DKP-NTT, maka dalam jangka waktu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 618.487 m² yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp. 86.652.207.019,31,- yaitu :
 - Kota Kupang seluas 105.440 m²;
 - Kabupaten Kupang seluas 76.225 m²;
 - TTS seluas 38.228 m²;
 - TTU seluas 41.275 m²;
 - Alor Seluas 15.023 m²;
 - Flotim seluas 37.317 m²;
 - Ende seluas 19.495 m²;
 - Ngada seluas 90.450 m²;
 - Nagekeo seluas 23.000 m²;
 - Manggarai seluas 17.524 m²;
 - Sumba Timur seluas 112.910 m²;

- Sumba Barat Daya seluas 41.600 m².
- b. Gedung dan Bangunan sejumlah 135 (seratus tiga puluh lima) unit dengan nilai sebesar Rp. 35.378.812.532,-;
- c. Kendaraan Roda 6 berjumlah 1 (satu) unit di Dinas;
- d. Kendaraan Roda 4 berjumlah 16 (enam belas) unit dengan perincian 9 (sembilan) unit kendaraan di dinas, 7 (tujuh) Unit di Cabang Dinas dan UPTD;
- e. Kendaraan Roda 3 berjumlah 3 (tiga) unit di Dinas;
- f. Kendaraan Roda 2 Berjumlah 58 (lima puluh delapan) unit, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dinas sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit;
 - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah I Sebanyak 3 (tiga) Unit;
 - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah II Sebanyak 4 (empat) Unit;
 - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah III Sebanyak 3 (tiga) Unit;
 - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah IV Sebanyak 3 (tiga) Unit;
 - Cabang Dinas Kelautan dan dan Perikanan Wilayah V Sebanyak 5 (lima) Unit.
 - UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Sebanyak 4 (empat) Unit;
- g. Kapal pengawas berjumlah 3 (tiga) unit, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas sebanyak 1 (satu) Unit;
 - Cabang Dinas Wilayah II Sebanyak 1 (satu) Unit;
 - UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sebanyak 1 (satu) Unit;

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berdampak signifikan bagi kemajuan dan perkembangan sektor

kelautan dan perikanan.

Berbagai capaian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perikanan Tangkap

Pelayanan di bidang perikanan tangkap mengalami fluktuasi volume produksi hasil tangkapan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Gambar 2.2 Trend Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2023

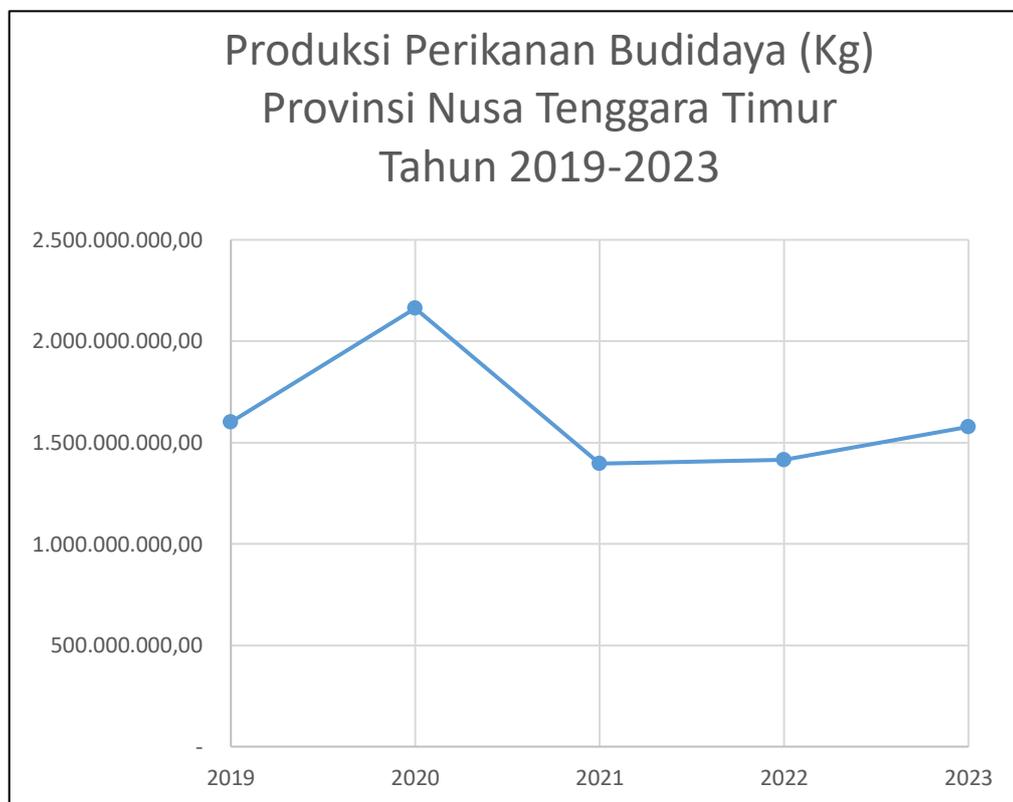
Gambar diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Produksi tahun 2019 tercatat 137.029.903 ton, dan mengalami peningkatan 24,02 % pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 32% dikarenakan wabah covid-19. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan produksi sebesar 20,49% dan 2023 meningkat lagi 10,14%. Dengan demikian, pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan tangkap selama kurun waktu 2019-2023 berhasil meningkatkan nilai produksi rata-rata 25,65%.

b. Perikanan Budidaya

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan budidaya cukup signifikan dalam kurun waktu 2019-2020. Intervensi program dan kegiatan dilakukan

terhadap kegiatan budidaya air laut, budidaya air payau dan budidaya air tawar. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan budidaya ikan kerapu (KJA) di Perairan Teluk Kelambu, Riung Kabupaten Ngada dan Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao. Diharapkan 2-3 tahun kedepannya perairan-perairan ini dapat memiliki sumber daya ikan (produksi ikan kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Pelayanan untuk kegiatan budidaya rumput laut yang merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi NTT di sector kelautan dan perikanan. Trend keberhasilan peningkatan produksi budidaya rumput laut selama kurun waktu 2019-2023 ditunjukkan oleh grafik berikut ini.



Gambar 2.3 Trend Produksi Rumput Laut Tahun 2019-2023

Gambar diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 total produksi rumput laut adalah sebesar 1.600.421 ton, pada tahun 2020 mengalami peningkatan produksi sebesar 26%,

tahun 2021 mengalami penurunan 55% dikarenakan wabah covid-19, tahun 2022 naik 1% dan tahun 2023 meningkat 10%. Dengan demikian rata-rata produksi rumput laut selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami penurunan sebesar 8%.

Pelayanan terhadap kegiatan budidaya non rumput laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir cukup berfluktuasi. Keragaan hasil pelayanan dibidang budidaya non rumput laut ditampilkan pada grafik berikut ini.



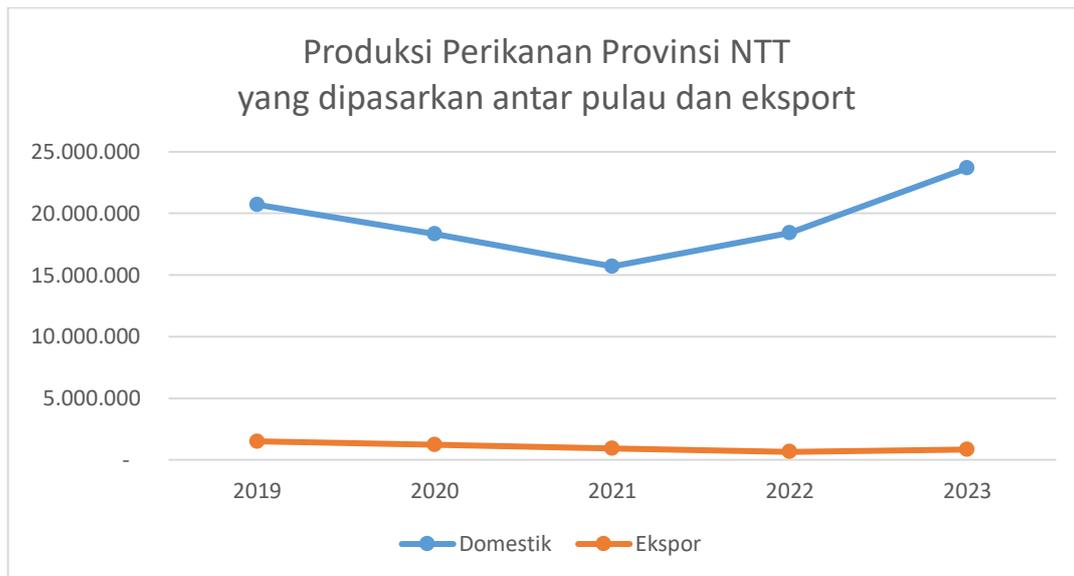
Gambar 2.4 Trend Produksi Perikanan Budidaya non Rumput Laut Tahun 2019-2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa produksi budidaya non rumput laut terjadi penurunan pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019 sebesar 32,49%, akan tetapi selama periode 2021 sampai dengan 2023 terjadi kenaikan produksi secara berturut-turut sebesar 38,62%, 177,71%, dan 59,33%. Secara garis besar rata-rata kenaikan produksi budidaya non Rumput laut dari tahun 2019 hingga 2023 ialah sebesar 60,88%.

c. Pemasaran Hasil Perikanan

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bidang pemasaran hasil perikanan dipriorotaskan pada peningkatan

pemasaran antara pulau dan ekspor, disamping pemasaran skala lokal. Total produk perikanan yang dipasarkan antar pulau dan ekspor ditampilkan pada grafik berikut ini.

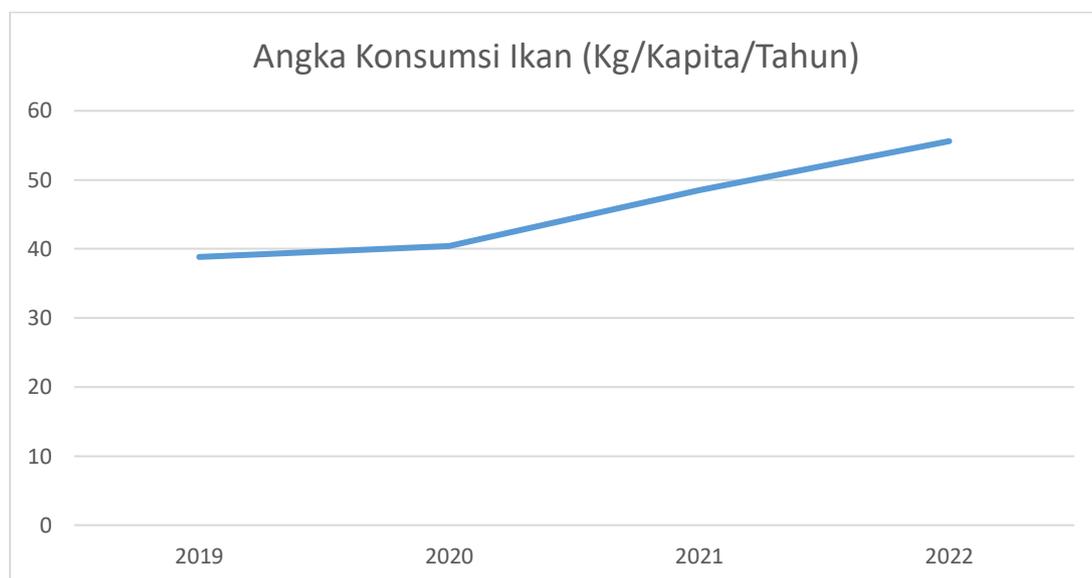


Gambar 2.5 Trend Produksi Perikanan yang dipasarkan Antar Pulau dan Ekspor Tahun 2019-2023

Gambar di atas memperlihatkan bahwa produk perikanan NTT lebih banyak dipasarkan antar pulau dibandingkan ke luar negeri. Pada tahun 2019, pemasaran produk perikanan antar pulau mencapai 20.712 ton, sedangkan yang berhasil diekspor mencapai 1.499,44 ton. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan yakni sebesar 11,59% dan 14,26% untuk pemasaran antar pulau dan ekspor sebesar 17,38% dan 24,05%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan pada pemasaran antar pulau yakni sebesar 17,31%, akan tetapi pemasaran secara ekspor masih mengalami penurunan yakni sebesar 31,80%. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan baik itu pemasaran produk perikanan antar pulau maupun ekspor yakni sebesar 28,56% untuk pemasaran antar pulau dan 33,08% yang dipasarkan secara ekspor. Dengan demikian produk perikanan NTT lebih banyak dipasarkan antar pulau dengan rata-rata persentasi kenaikan sebesar 5% dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

d. Angka Konsumsi Ikan

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal penjaminan mutu, promosi dan distribusi produk perikanan selama kurun waktu 2019-2022 berdampak pada peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut ini.



Gambar 2.6 Trend Angka Konsumsi Ikan Tahun 2019-2022

Pada tahun 2019, Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 38,84 kg/kapita/tahun. Selanjutnya nilai AKI terus mengalami peningkatan sebesar 3,99% pada tahun 2020, 20,08% pada tahun 2021 dan 14,66% pada tahun 2022. Dengan demikian, persentase peningkatan Angka Konsumsi Ikan masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah selama kurun waktu 2019-2022 adalah sebesar 12,91%. Namun begitu, Angka Konsumsi Ikan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 yakni sebesar 55,61 kg/kapita/tahun masih dibawa Angka Konsumsi Ikan Nasional yang mencapai 56,48 kg/kapita/tahun, sehingga dibutuhkan intervensi program dan kegiatan yang lebih masif guna mencapai Angka Konsumsi Ikan

Nasional.

Capaian keseluruhan program pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Sat.	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan daerah yang dikelola	%	Luasan Kawasan Konservasi	93,75	100	103,78	103,84	100	100,58
2	Perikanan Tangkap	%	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	6	7	20,49	10,14	92,88	98,07
3	Produksi perikanan Budidaya	%	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10	20	1,36	10,35	65,99	61,44
4	Penurunan kasus IUU Fishing	%	Penurunan kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	20	0	32,83	28,12	64,15	0
5	Ketersediaan pangan perikanan di Pariwisata Estate	%	Angka Konsumsi Ikan	8,7	8	5,61	5,61	64,48	70,12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 103,78 atau 701.545,41 Ha dari target sebesar 633.750 ha sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 103,84 atau 701.928,02 Ha. Adapun luasan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan antara lain: SAP Selat Pantar dan Perairan sekitarnya seluas 276.693 Ha, kawasan konservasi di perairan wilayah Flores Timur seluas 150.069,35 Ha, kawasan konservasi di perairan wilayah Lembata seluas 199.688,38 Ha dan kawasan konservasi di perairan wilayah

seluas Sikka 75.097,68. Pada indikator produksi perikanan tangkap pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 92,88% atau 171.837 Ton sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 98,07% atau 191.232 Ton. Sedangkan pada indikator produksi perikanan budidaya pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 65,99% atau 1.415.498 Ton sedangkan di Tahun 2023 sebesar 61,44% atau 1.578.981 Ton. Pada indikator penurunan kasus IUU fishing dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) rasio capaian masih belum mencapai target pada Tahun 2022 Tahun 2023 yaitu sebesar 64,15% dan 64,48% dan 70,12%.

2.3.1 Sumber Pembiayaan

Dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023, pembiayaan Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), guna mendukung tugas dan fungsi pokoknya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C-24 Anggaran Dan Realisasi Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Untuk Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1.	BELANJA DAERAH																	
	A. Belanja Tidak Langsung																	
	Belanja Pegawai	13.079.041.000	13.048.609.000	14.940.586.000	12.835.972.000	12.535.190.000	12.152.116.100	11.841.422.664	13.907.237.841	10.930.858.616	10.508.514.722	92,91	90,75	93,08	85,16	83,83	(0,54)	(2,59)
	B. Belanja Langsung																	
	Belanja Urusan Pilihan	48.437.119.000	39.569.149.528	48.197.821.170	36.617.276.701	39.044.347.247	46.465.236.006	36.426.171.828	46.614.168.865	34.890.806.926	36.015.471.004	95,93	92,06	96,71	95,29	92,24	(3,48)	(3,89)
	Total Belanja Daerah	61.516.160.000	52.617.758.528	63.138.407.170	49.453.248.701	51.579.537.247	58.617.352.106	48.267.594.492	60.521.406.706	45.821.665.542	46.523.985.726	95,29	91,73	95,86	92,66	90,20	(2,96)	(3,76)

Tabel 2.4 Anggaran Dan Realisasi Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Untuk Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1.	BELANJA APBN																	
	(01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (249001)	1.024.221.000	360.313.000	427.944.000	232.020.000	296.683.000	1.014.760.500	358.154.000	425.211.500	223.888.800	294.726.000	99,08	99,40	99,36	96,50	99,34	(15,99)	(15,42)
	(03) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (249084)	444.320.000	167.555.000	348.640.000	605.407.000	565.381.000	444.318.000	167.555.000	344.640.000	604.701.300	565.378.000	100	100	98,85	99,88	100,00	28,21	28,09
	(04) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (249085)	564.258.000	322.178.000	445.550.000	359.995.000	595.827.000	563.079.200	322.174.892	443.550.000	356.545.000	461.449.000	99,79	100	99,55	99,04	77,45	10,42	1,17
	(05) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (249086)	570.180.000	437.742.000	156.902.000	167.935.000	293.482.900	456.095.600	414.129.000	152.046.009	167.163.000	293.298.354	79,99	94,61	96,91	99,54	99,94	(1,40)	3,32
	(06) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (249087)	230.950.000	68.594.000	129.097.000	381.950.000	317.367.000	230.115.600	68.594.000	129.053.000	381.596.930	202.412.902	99,64	100	99,97	99,91	63,78	49,21	41,67
	(07) Program Pengelolaan Ruang Laut (249088)	742.500.000	257.750.000	156.500.000	412.047.000	726.804.000	728.140.800	218.128.000	146.411.850	389.221.999	642.105.000	98,07	84,63	93,55	94,46	88,35	33,78	31,97
	(03) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (249169)	-	-	-	1.780.831.000	563.000.000	-	-	-	1.778.330.500	561.491.500	-	-	-	99,86	99,73	(68,39)	(68,43)
	Total Belanja APBN	3.576.429.000	1.614.132.000	1.664.633.000	3.940.185.000	3.358.544.900	3.436.509.700	1.548.734.892	1.640.912.359	3.901.447.529	3.020.860.756	96,09	95,95	98,58	99,02	89,95	13,86	16,55

Tabel 2.5 Target dan Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Target Pendapatan Pada Tahun (Rp.)					Realisasi Pendapatan Pada Tahun (Rp.)					Rasio Pendapatan Antara Realisasi dan Target Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1.	PENDAPATAN																	
	Pendapatan dari Dinas	1.181.381.250	11.400.000.000	13.789.000.000	18.922.100.000	10.000.000.000	2.420.437.799	4.186.123.964	5.750.138.637,45	7.562.645.232,05	7.611.509.196	204,88	36,72	41,70	39,97	76,12	219,00	35,62

Data di atas menunjukkan bahwa alokasi APBD mendukung pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Alokasi APBD Tahun Anggaran 2022 ke Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp. 2.126.288.546 atau 4,30%. Rincian pendanaan APBN melalui dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 3.901.447.529 dan di Tahun Anggaran 2023 turun menjadi Rp. 3.020.860.756 atau (22,57%). Untuk target Pendapatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sebesar Rp. 18.922.100.000 dengan realisasi Rp. 7.562.645.232,05 sedangkan untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan realiasi Rp. 7.611.509.196.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar didominasi oleh perairan laut dengan luas $\pm 200.000 \text{ km}^2$, di dalamnya terkandung berbagai sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati. Seyogyanya sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Karakteristik perairan seperti merupakan aset strategis yang dapat didayagunakan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis lingkungan strategis, terdapat sejumlah tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Lingkup pengembangan pelayanan telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bidang pelayanan meliputi:

- Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya;
- Bidang Perikanan Tangkap;

- Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan;
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I, II, III, IV dan V;
- UPTD Pengelola Taman Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dijabarkan dalam masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Tantangan utama dalam pengelolaan ruang laut dan budidaya pengelolaan yang efektif dan efisien. Efektifitas pengelolaan bisa diukur melalui 3 komponen besar: (1) Sosial ekonomi - Bagaimana ruang laut mampu memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dengan menyediakan potensi pariwisata dan perikanan; (2) Biofisik - Bagaimana aset sumber daya alam laut terjaga dengan baik untuk tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan; dan (3) Tata kelola - Diperlukan tata kelola yang baik, meliputi kelembagaan, program kerja, sarana dan prasarana serta pendanaan berkelanjutan untuk memenuhi komponen sosial ekonomi dan terjaganya aset sumber daya alam kelautan dan perikanan. Untuk menjawab 3 komponen besar tersebut, Provinsi NTT telah mempunyai Perda NTT No 4 tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2037, akan tetapi pungutan jasa retribusi belum dapat di terapkan karena adanya Perda Provinsi NTT No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi daerah. Retribusi di bidang kelautan dan perikanan Pemda Provinsi hanya diberikan pada bidang perikanan yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap sedangkan retribusi dibidang kelautan tidak diberikan. Tantangan ke

depan lainnya adalah fenomena perubahan iklim. Pemanasan suhu permukaan air laut merupakan ancaman perairan terutama keberlangsungan hidup terumbu karang dan perikanan budidaya seperti rumput laut sehingga mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dikawal. Pencemaran di laut meliputi sampah plastik dan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, dan kapal bisa menjadi ancaman serius jika tidak ada penanganan pengelolaannya. Banyaknya kasus pencemaran minyak di laut dan wilayah pesisir perairan NTT disebabkan karena Provinsi NTT berada pada jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) sebagai jalur pelayaran Internasional. Kasus-kasus tumpahan minyak tersebut telah memberikan dampak negatif yang signifikan bagi perairan laut khususnya biota laut dan ekosistem pesisir lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove serta biota laut di dalamnya, termasuk mamalia laut meliputi paus, lumba-lumba dan dugong yang menjadi biota ikonik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peluang yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengelolaan ruang laut yakni upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan perairan laut dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam yang menjadi konsep pembangunan berkelanjutan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang juga dimanfaatkan sebagai potensi pariwisata bahari. Peluang pengembangan budidaya perikanan terutama budidaya rumput laut dan offshore masih sangat potensial dalam mendorong peningkatan produksi perikanan. Dengan luasnya perairan, maka ruang laut dan perikanan budidaya masih dapat dimanfaatkan dengan optimal, sinergi dengan bidang pelayanan lainnya.

Pengembangan kemitraan strategis dengan para pihak menjadi salah satu peluang dalam lima tahun mendatang.

Penerapan pemanfaatan budidaya yang lebih optimal khususnya program budidaya pekarangan diupayakan untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di provinsi NTT. Selain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan terus meningkatkan angka konsumsi ikan (AKI) yang telah mencapai presentasi 55,61% pada tahun 2022.

b. Perikanan Tangkap

Tantangan di bidang perikanan tangkap adalah peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, armada tangkap, alat tangkap ramah lingkungan, sumber daya manusia (termasuk kelembagaan masyarakat dan IPTEK) untuk memanfaatkan stok perikanan tangkap secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, legal, dilaporkan dan taat regulasi (*LRR= Legal, Reported, Regulated Fishing*).

Dari luasnya perairan di Provinsi NTT, terdapat peluang sumber daya perikanan tangkap dengan potensi lestari sebesar 491.700 ton/tahun. Produksi perikanan tangkap tahun 2023 baru sebesar 191.232 ton atau 48,61% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 393.360 ton/tahun. Komoditi unggulan perikanan tangkap ini berupa ikan tuna, cakalang, tongkol, ikan pelagis kecil, ikan demersal dan ikan ekonomis penting lainnya. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap harus melibatkan investasi dan pembangunan industri perikanan dan mendatangkan kapal-kapal penangkap ikan yang lebih modern.

c. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Luas laut dan banyaknya pulau-pulau kecil memberikan tantangan yang besar dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan lainnya adalah perairan Provinsi NTT yang berbatasan dengan negara lain, memerangi *IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)* untuk melindungi akses sebagian besar masyarakat NTT yang masih menggunakan alat tangkap tradisional. Di samping itu, armada pengawasan masih terbatas baik dalam hal jumlah maupun ukuran, serta keterbatasan SDM pengawasan.

Peluangnya adalah membangun kemitraan atau jejaring pengelolaan perairan, baik skala lokal (perairan dalam provinsi), nasional (antara provinsi dalam Kepulauan Sunda Kecil dan provinsi lainnya yang berbatasan dalam perairan) maupun regional antar negara melalui pengembangan jejaring regional kawasan perairan antara Indonesia, Timor Leste dan Australia. Dari sisi kebijakan, telah tersedia perangkat regulasi yang kuat untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan menjawab tantangan-tantangan di atas.

Kegiatan pengawasan juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pengolahan dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, maraknya nelayan pelintas batas laut negara menjadi salah satu tantangan dalam upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya nelayan pelintas batas, dengan keterbatasan alat penangkapan ikan dan kapal membuat nelayan akan semakin jauh mencari ikan dan melewati batas negara. Selain itu tingkat pendidikan dan literasi nelayan yang masih kurang, sehingga belum memahami secara menyeluruh mengenai

kondisi perbatasan laut Indonesia. Sejauh ini upaya penanggulangan masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas laut negara.

d. Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Tantangan dalam bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan meliputi banyaknya usaha masyarakat yang masih skala kecil dan tradisional, daya saing rendah, kurangnya diversifikasi produk olahan, minimnya akses informasi dan pasar serta keterbatasan sumber daya manusia.

Hal-hal di atas menjadi faktor penyebab daya saing produk perikanan NTT masih jauh di bawah produk perikanan dari beberapa Provinsi di Indonesia, terutama dalam hal kualitas produk. Hal ini menyebabkan walaupun produksi perikanan Nusa Tenggara Timur cukup tinggi namun dari aspek mutu/kualitas produk masih rendah, karena pendekatan peningkatan produksi masih belum dibarengi dengan pendekatan mutu/kualitas produk.

Peluangnya adalah pasar yang luas untuk menyerap produk-produk kelautan dan perikanan. Meningkatnya kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena mengandung nilai gizi yang tinggi, rendah kolesterol dan mengandung asam lemak tak jenuh omega 3 yang dapat meningkatkan kecerdasan. Dampak konsumsi ikan secara global yang menuntut produk pangan yang dapat diterima secara global, sehingga komoditas ikan merupakan jenis produk pangan yang memenuhi syarat tersebut.

Revolusi industri 4.0 sektor kelautan dan perikanan menitikberatkan pada potensi pengembangan teknologi dan *e-commerce* atau transaksi jual beli produk yang bergantung pada pelayanan online dan internet. Potensi ini

akan lebih mendekatkan antara produsen dan konsumen dengan perdagangan berkeadilan namun menuntut peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan produk yang berdaya saing tinggi.

Mencermati rentang kendali geografis termasuk keseluruhan tantangan dan peluang pengembangan di atas, maka Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di 5 (lima) wilayah dan 1 (satu) UPTD yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, peran pelayanan melalui Kantor Cabang Dinas dan UPTD perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana serta pengalokasian program dan pendanaan yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan semakin berkualitas. Disamping itu perlu ditingkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) untuk mengurangi angka stunting dengan memperluas pendistribusian hasil perikanan sampai ke pelosok-pelosok melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) yang bekerjasama dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) serta budidaya ikan pekarangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKP PROVINSI NTT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKP Provinsi NTT

Berdasarkan hasil identifikasi dan beberapa kajian, permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	Pemasaran masih didominasi oleh penjualan domestik sehingga harga jual ikan masih relatif rendah	Masih rendahnya investasi (<i>buyer</i>) dibidang ekspor produk perikanan
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	Masih rendahnya SDM dan belum masuknya teknologi terapan tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan	Melakukan pembinaan dan <i>pilot project</i> untuk teknologi tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan
3	Kerusakan wilayah perairan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan penangkapan ikan	Belum optimalnya sosialisasi tentang kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan

		yang ramah lingkungan dan belum optimalnya upaya pengawasan	terbatasnya sarpras pengawasan
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	Belum terpenuhinya penyediaan bibit unggul rumput laut	Terbatasnya kebun bibit unggul rumput laut yang diperbanyak melalui seleksi varietas dan kultur jaringan
5	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan berbasis perikanan	Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di kalangan masyarakat NTT	Masih belum terjangkaunya harga ikan dan distribusi ikan di daerah pelosok dan kurangnya sosialisasi GEMARIKAN di Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir; masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan; kerusakan wilayah perairan; belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut; dan tingginya angka stunting di NTT.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT saat ini telah melaksanakan beberapa inovasi dalam mendukung kualitas pelayanan publik, yaitu :

a. Mekanisme pungutan PAD

Seluruh Penerimaan Asli Daerah dipungut oleh petugas dirubah menjadi melalui sistem perbankan;

b. SIREK (Sistem Rekomendasi) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengelolaan Ruang Laut;

- c. Budidaya perikanan sistem KJA;
- d. Gerai perijinan dokumen kapal perikanan;
- e. TPI higienis terintegrasi dengan kuliner;
- f. Pengembangan *hatchery*;
- g. Sistem pengawasan berbasis drone.
- h. Kerja kolaborasi dengan pelibatan perguruan tinggi dan pihak ketiga (LSM dan Swasta)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program pada perodesasi ke 4 RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT ini disusun dengan tetap merujuk pada Visi, Misi serta Program Prioritas RPJPD 2005-2025. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung visi dan misi RPJPD 2005-2025 yaitu : **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk mencapai **Misi ke-3** yaitu Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; yang bermakna melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung misi ini dengan memberikan bantuan/hibah pada masyarakat perikanan berupa sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya perikanan sejalan dengan arahan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RPD 2024-2026 yang menjadi salah satu sektor penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Masing-masing level pemerintah menetapkan target indikator sarasannya dan akan diukur pencapaiannya tiap tahun. Berdasarkan hasil capaian inilah akan ditentukan sasaran yang belum optimal dikerjakan dan usaha apa yang perlu ditempuh untuk memperbaiki keadaan tersebut pada periode Renstra 5 tahunan berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka beberapa permasalahan yang dijumpai beserta faktor penghambat dan pendorong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sasaran Jangka Menengah, Permasalahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi	Peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan sarpras
			Masih rendahnya SDM dan kurangnya inovasi teknologi	Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

			terapan tepat guna	
			Masih kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	Tingkat kepercayaan lembaga keuangan masih rendah dan kesulitan akses permodalan
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Tingkat kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku masih rendah	Kurangnya publikasi peluang investasi	Prospek pengembangan usaha perikanan
			Kurangnya sosialisasi tentang peraturan Perundang-Undangan	Kemudahan dalam pengurusan perijinan berusaha
3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Produksi perikanan belum optimal	Kegiatan usaha perikanan masih berskala kecil	Besarnya potensi perikanan dan peluang investasi
		Pengelolaan kawasan konservasi belum efektif	Masih rendahnya SDM pengelola kawasan	Kemitraan dalam pengelolaan kawasan
			Masih Kurangnya program dan pendanaan pengelolaan Kawasan	Cukup Tersedianya sumber pendanaan non pemerintah
			Kurang meratanya	Tingginya minat masyarakat

		Tingkat konsumsi ikan masih rendah	distribusi ikan	untuk mengkonsumsi ikan
			Kurangnya sosialisasi tentang manfaat konsumsi Ikan	Meningkatkan kegiatan Gemarikan
4	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	Produk regulasi daerah terkait pengelolaan kelautan dan perikanan masih terbatas	Pembentukan regulasi membutuhkan biaya dan proses yang panjang	Pengaturan dalam pengelolaan SDKP berkelanjutan
5	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Masih rendahnya tingkat pengawasan SDKP termasuk di wilayah perbatasan	Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan	Peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan Sarpras
			Kurangnya SDM pengawasan	Pelatihan aparatur pengawasan
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Pemberdayaan masyarakat melalui POKMASWAS
6	Masih tingginya angka stunting karena rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Pendistribusian ikan belum sampai ke pelosok	Harga komoditas perikanan masih tinggi sehingga tidak terjangkau masyarakat	Sosialisasi GEMARIKAN melalui FORIKAN Bantuan sarpras untuk pendistribusian ikan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan salah satu dokumen pengendalian lingkungan sehingga permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir agar pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Provinsi NTT dalam implementasi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi NTT yang dijabarkan secara teknis dalam Renstra Perangkat Daerah. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan yang dirumuskan dalam perubahan Renstra sudah diintegrasikan atau mengakomodir prinsip pembangunan berkelanjutan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut terimplementasi dalam indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan provinsi yang telah terintegrasi pada indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang terjabarkan dalam renstra. TPB terdiri dari 4 (empat) pilar dan 17 (tujuh belas) *goals*, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam 2 (dua) pilar dengan 4 (empat) *goals* yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.3 Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pilar	No. TPB	Tujuan	Pemangku Kepentingan (PD Provinsi NTT)
Pembangunan Sosial	1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun 1	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan Lingkungan	3	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Melestarikan & memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan , Dinas LHK

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra, dikenal istilah pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness and Growth*). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk

menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Berdasarkan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi dari sisi pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap RPJMD, Renstra KKP dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, RTRW dan KLHS, maka didapat 5 (lima) permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Kelima isu ini dibobot dengan metode USG agar diperoleh Isu Strategis yang akan dijawab dalam kurun waktu 5 tahunan periode pembangunan ke depan. Secara lebih lengkap ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Pembobotan Isu Strategis

No	Permasalahan	Nilai Skala Bobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	5	5	5	15
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	4	4	5	13
3	Kerusakan wilayah perairan	4	4	5	13
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	4	5	4	13
5	Tingginya angka stunting di NTT	5	5	5	15

Hasil pembobotan isu strategis dengan metode USG diatas menunjukkan bahwa isu prioritas dengan bobot tertinggi adalah Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir (Total skor 15). Isu selanjutnya adalah tingginya angka stunting di NTT (Total Skor 15).

Dari isu permasalahan pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir (Skor 15) dan tingginya angka stunting di NTT (Skor 15) maka dapat dilanjutkan dengan analisis SWOT sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- Besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi NTT;
- Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan;

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia;
- Masih kurangnya kemampuan IPTEK;
- Masih kurangnya dukungan infrastruktur;
- Kurangnya investasi dan inovasi produk kelautan dan perikanan.

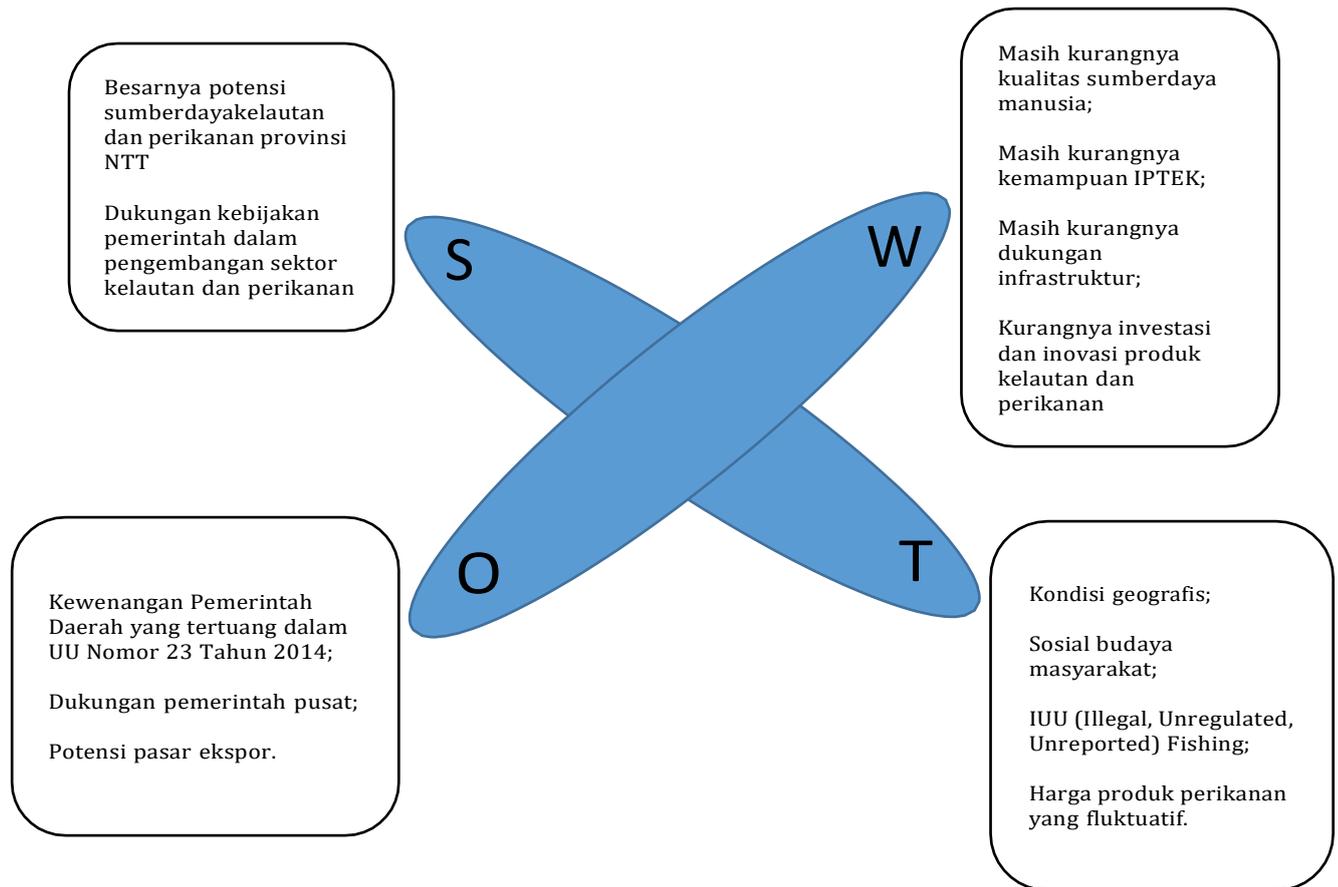
b. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

- Kewenangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Dukungan pemerintah pusat;
- Potensi pasar ekspor.

2. Ancaman (*Threat*)

- Kondisi geografis;
- Sosial budaya masyarakat;
- IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing;
- Harga produk perikanan yang fluktuatif.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				TAHUN DASAR 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,77	2,79	2,80	2,81	2,81
		Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah (%)	0,40	1	1,1	1,2	1,2
		Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	92,55	100	102	104	104
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	92,24	100	102	104	104
		Meningkatnya status pangan berbasis perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan (kg/kapita/tahun)	45,92	56	58	60	60

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				TAHUN DASAR 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata <i>Estate</i> (Jenis)	12	12	14	16	16
2	Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Perairan Laut yang bebas IUU Fishing	Penurunan Kasus UU Fishing (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>) (%)	10,34	6,89	3,45	0	0
		Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (Ha)	701.545	790.420	790.420	803.326	803.326

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

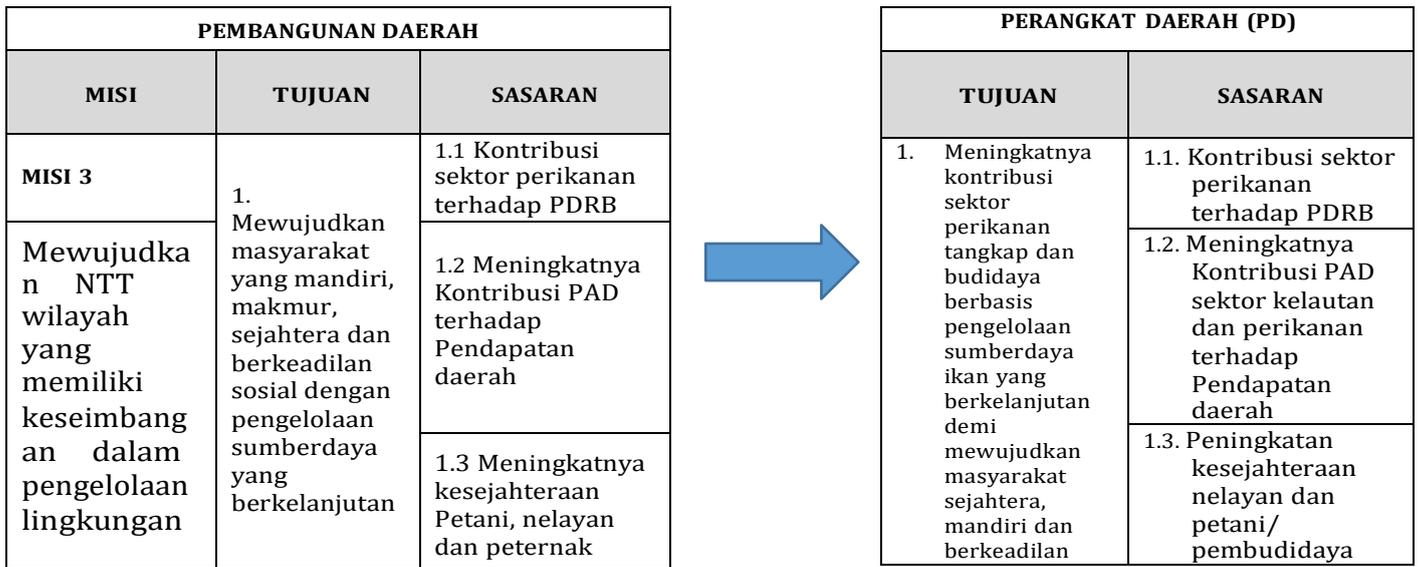
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan DKP Provinsi NTT

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DKP Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat	1.1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	1.1.1 Optimalisasi sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
			Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi	Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi	Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi
		1.1.2. Tata Kelola Perikanan Tangkap	Perijinan perikanan tangkap	Perijinan perikanan tangkap	Perijinan perikanan tangkap
		1.1.3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut	Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut	Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut
			Peningkatan produktifitas budidaya ikan	Peningkatan produktifitas budidaya ikan	Peningkatan produktifitas budidaya ikan
			Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya	Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya	Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya
	1.2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/pembudidaya	1.2.1. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Teknologi	Pengembangan Kapasitas SDM Nelayan dan Pembudidaya	Pengembangan Kapasitas SDM Nelayan dan Pembudidaya	Pengembangan Kapasitas SDM Nelayan dan Pembudidaya
			Diversifikasi produk pasca panen	Diversifikasi produk pasca panen	Diversifikasi produk pasca panen
	1.3. Meningkatkan angka konsumsi ikan	1.3.1. Optimalisasi Distribusi dan Pengolahan produk hasil Perikanan tangkap dan Budidaya	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)	Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
			Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
			Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
			Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)	Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)	Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)

Gambar 5.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan ditampilkan di dalam tabel T-C.27. Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan 6 (enam) program untuk kurun waktu 2024-2026, dengan penjelasan 1 (satu) program bersifat rutin dan 5 (lima) program mendukung langsung pencapaian sasaran di dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026.

Tabel ini menggambarkan juga besaran indikator untuk tiap-tiap program yang diusulkan, bahkan sampai dengan level kegiatan beserta pagu dana indikatif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan tersebut. Secara lebih detil akan ditampilkan dalam tabel T-C.27.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
PROVINSI NTT 2024 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					47.462.902.968		44.225.899.489		53.082.644.897		
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	100	19.330.092.948	100	20.144.950.921	100	20.495.973.921	100	
				Meningkatnya sarana dan prasarana	%	100	100		100		100		100	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%	100	100		100		100		100	
		3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					753.139.731		265.549.000		335.549.000		
		3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	-	1	10.000.000	1	20.000.000	1	
		3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7	42.227.963	7	89.399.000	7	99.399.000	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	
		3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	Sekretariat Dinas
		3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7	700.911.768	7	121.150.000	7	131.150.000	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data	1	-	-	1	20.000.000	1	30.000.000	1	
		3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	-	-	1	5.000.000	1	15.000.000	1	
		3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.178.915.000		14.032.104.889		14.057.104.889		
		3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	138	137	13.137.128.000	137	14.022.104.889	137	14.027.104.889	137	Sekretariat Dinas
		3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	-	-	1	5.000.000	1	15.000.000	1	
		3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	84	41.787.000	6	5.000.000	6	15.000.000	6	Sekretariat Dinas
		3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.240.000		8.000.000		23.000.000		
		3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-	-	1	3.000.000	1	8.000.000	1	
		3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	8.240.000	1	5.000.000	1	15.000.000	1	Sekretariat Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											
		3.25.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	12	5.000.000	12	15.000.000	12	
		3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		10.000.000		30.000.000		
		3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	1	5.000.000	1	15.000.000	1	Sekretariat Dinas
		3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	1	50.000.000	-	-	-	-	1	
		3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	-	-	1	5.000.000	1	15.000.000	1	
		3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					167.520.000		337.102.432		392.102.432		
		3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	-	2	8.832.492	2	18.832.492	2	
		3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7	39.680.000	7	84.379.000	7	94.379.000	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	19	9.600.000	84	7.700.000	84	17.700.000	84	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	7	38.240.000	6	76.534.432	6	81.534.432	6	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	7	39.000.000	7	74.400.000	7	84.400.000	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	7	41.000.000	6	85.256.508	6	95.256.508	6	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					107.705.000		131.600.000		151.600.000		
		3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	7	44.935.000	7	43.300.000	6	53.300.000	6	Sekretariat Dinas, Bidang, 5
		3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7	52.770.000	6	88.300.000	6	98.300.000	6	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas
		3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	
		3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.651.478.817		4.940.451.600		4.970.451.600		
		3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7	44.760.000	7	36.800.000	7	46.800.000	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	7	849.568.677	7	869.732.000	7	879.732.000	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	7	3.757.150.140	7	4.033.919.600	7	4.043.919.600	7	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					413.094.400		415.143.000		521.166.000		
		3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	-	0	60	130.000.000	60	206.023.000	60	
		3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	84	368.094.400	29	196.023.000	29	206.023.000	29	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	27	35.000.000	37	45.620.000	38	55.620.000	38	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	10.000.000	9	43.500.000	9	53.500.000	9	Sekretariat Dinas, Bidang, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	701.545	790.420	1.289.854.000	790.420	430.697.568	803.326	2.944.769.359	803.326	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
	Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					379.854.000		415.697.568		2.289.769.359		
		3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	701.540	790,42	321.854.000	978,239	158.000.000	978,239	308.000.000	978,239	
		3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	276.000	6	58.000.000	8	146.655.568	8	296.655.568	276.000	
		3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-	Orang	-	-	-	160	51.046.000	100	601.046.000	100	
		3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	-	-	-	145	49.996.000	1+L57	649.996.000	67	
		3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	-	-	-	2	5.000.000	2	333.500.000	2	
		3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen	1	-	-	1	5.000.000	1	100.571.791	1	
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi izin didalam kawasan konservasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil					910.000.000		15.000.000		655.000.000			
		3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	10	-	-	15	10.000.000	15	550.000.000	15		
		3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	kelompok	12	2	910.000.000	-	-	-	-	-	2	
		3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Penggaraman yang tersedia	Unit	1	-	-	1	5.000.000	1	105.000.000	1		
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	186.364	200.000	24.314.540.020	205.000	22.541.908.000	205.000	25.260.643.237	210.000		Bidang Perikanan Tangkap
	Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					5.272.354.860		99.807.000		272.292.237			
	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	7	30.000.000	60	74.807.000	50	174.807.000	50		
	Meningkatnya status pangan perikanan	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	unit	10	198	5.242.354.860	100	25.000.000	100	97.485.237	100		
		3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					2.500.000		-		-			
		3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	-	1	2.500.000	-	-	-	-	-		
		3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30					-		120.223.000		320.223.000			
		3.25.03.1.03.0004	Berkomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi	Persentase	100	100	-	100	120.223.000	100	320.223.000	100		
		3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					49.852.160		69.373.000		115.623.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	dokumen	50	280	49.852.160	-	-	-	-	-	-	
		3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	dokumen	709	-	-	261	65.623.000	158	100.623.000	158		
		3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	dokumen	709	-	-	50	3.750.000	5	15.000.000	5		
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					18.989.833.000		22.252.505.000		24.552.505.000			
		3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	pelabuhan perikanan	1	1	5.000.000	-	-	-	-	-		
		3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	unit	4	7	18.984.833.000	5	22.052.505.000	5	24.152.505.000	5		
		3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	1	-	-	3	200.000.000	3	400.000.000	3		
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.404.233	1.620.000	1.646.497.000	1.749.600	266.260.000	#####	1.969.359.640	1.889.568	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	
	Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					0		41.500.000		251.500.000			
	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	-	-	-	91	41.500.000	35	251.500.000	35		
	Meningkatnya status pangan perikanan	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					14.526.000		194.760.000		1.317.959.441			
		3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	1	14.526.000	5	50.000.000	5	282.000.441	5		
		3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	-	-	-	130	42.000.000	85	272.199.000	85		
		3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	-	-	-	5	44.560.000	5	260.560.000	5		
		3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	-	-	-	17	21.500.000	17	256.500.000	17		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	17	36.700.000	17	246.700.000	17	
		3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat					1.631.971.000		30.000.000		399.900.199		
		3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	1	1.616.971.000	-	-	-	-	1	
		3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	15.000.000	-	-	-	-	1	
		3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	-	-	2	20.000.000	2	203.000.000	2	
		3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-	2	10.000.000	2	196.900.199	2	
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	%	10,34	6,89	866.919.000	3,45	751.083.000	3,45	2.291.319.508	-	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 5 Cabang Dinas dan 1 UPTD
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					866.919.000		673.363.000		1.217.956.508		
		3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	7	257.304.000	-	-	-	-	7	
		3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	7	134.000.000	-	-	-	-	7	
		3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	7	34.665.000	-	-	-	-	7	
		3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	50	137	440.950.000	-	-	-	-	137	
		3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	-	-	-	18	34.000.000	18	80.000.000	18	
		3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Orang	59	0	0	85	41.500.000	85	105.000.000	85	
		3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	2	-	-	35	114.000.000	35	180.000.000	35	
		3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	unit	-	-	-	3	39.000.000	3	92.000.000	3	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026				Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
							8	9	10	11	12	13	14				
		3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	1	-	-	46	61.000.000	46	105.000.000	46				
		3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	1	-	-	56	169.670.000	56	250.670.000	56				
		3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	1	-	-	46	65.870.000	46	105.263.504	46				
		3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	-	-	27	148.323.000	27	300.023.004	27				
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					0	77.720.000		1.073.363.000						
		3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	1	-	-	46	72.720.000	46	950.000.000	46				
		3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	-	-	-	5	5.000.000	5	123.363.000	5				
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya status pangan perikanan	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	45,92	56,00	15.000.000	58,00	91.000.000	58,00	120.579.232	60,00	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan			
	Terwujudnya pemenuhan unsur SA pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					15.000.000		91.000.000		120.579.232					
		3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	60	25	15.000.000	-	-	0	0	25				
		3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	kegiatan	10	-	-	1	10.000.000	1	30.000.000	1				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing	kegiatan	1	-	-	8	81.000.000	8	90.579.232	8	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara langsung menunjukkan target kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD secara terperinci disajikan pada tabel 7.1.

**TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NTT
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD 2024-2026**

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
I	Nilai Tukar Nelayan	105	106	106,3	106,8	106,8

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, telah dirumuskan secara sistematis dalam mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam 3 (tiga) tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 5 (lima) Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Program (*outcome*). Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala setiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 agar menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kupang, Agustus 2024

**Plt KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

Ir. AGUSTINUS BULU

PEMBINA TK. I

NIP. 196809151995031004